

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan koperasi di Indonesia sejak tercapainya kemerdekaan memiliki landasan hukum yang sangat kuat yaitu dengan diakuinya lembaga ini sebagai salah satu bentuk organisasi yang turut aktif memperjuangkan kondisi ekonomi rakyat. Landasan konstitusi ini secara positif diterjemahkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara tersendiri yaitu Undang-Undang Perkoperasian dan yang paling terakhir adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sama dengan badan-badan usaha lain di dalam pembangunan, khususnya di sektor ekonomi. Tujuan dari koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Namun meskipun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengalami proses amandemen, ketentuan hukum mengenai perkoperasian

belum berhasil disesuaikan hingga sekarang. Jauh sebelum gerakan koperasi berkembang di Indonesia, bangsa Indonesia telah mengenal dan mempraktikkan pola gotong royong dalam berbagai sendi kehidupannya. Asas gotong royong ini diyakini sangat identik dengan asal muasal kata koperasi yaitu *Co* dan *Operatus* (bahasa latin) yang berarti bekerjasama. Kerjasama dalam suatu bentuk organisasi itulah yang dikenal sebagai koperasi, tetapi tidak semua kerjasama yang diorganisir dapat disebut sebagai perkumpulan koperasi dan untuk itulah dibutuhkan landasan hukum tersendiri.

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan, perkreditan, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari Bank.

Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha-usaha di Indonesia, pada tanggal 23 Oktober 2010 telah terbit dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tentang *Exposure Draft* Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan yaitu pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian. Pencabutan PSAK No. 27 dilandasi alasan sebagai dampak dari konvergensi IFRS yang mengakibatkan SAK berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain. Sebagai pengganti PSAK No. 27, kini telah terbit Standar

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal seperti pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi harus mengedepankan *profit motive* namun di sisi lain koperasi diharapkan bertindak sebagai lembaga pemenuhan kebutuhan anggotanya sehingga perlu berperan ganda. Apabila *profit motive* dijadikan acuan bagi koperasi, maka kedudukan sisa hasil usaha (SHU) tidak ada bedanya dengan laba di lembaga usaha lainnya. Akan tetapi koperasi juga membutuhkan pendapatan untuk memelihara kehidupan

organisasinya. Selama ini pemahaman tentang perbedaan SHU dengan pengertian laba secara umum masih mengendap dalam wacana normatif dan belum pernah berhasil diterjemahkan secara praktis dan *applicable*. Banyak kalangan menganggap SHU bukan identik dengan laba tetapi belum ada yang berhasil menjelaskan secara tuntas dan lugas. Ini adalah salah satu contoh kecil mengapa diperlukan penataan baik dalam konsep-konsep dasar maupun dalam praktek berkoperasi. Setidaknya karena komitmen untuk menjadikan koperasi sebagai bagian dari wahana pembangunan ekonomi nasional.

Koperasi sebagai pelaku ekonomi di Indonesia diharapkan dapat berkembang secara sehat dan kuat sejajar dengan badan usaha lainnya. Sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial, koperasi memiliki banyak perbedaan dengan bentuk perusahaan lainnya, namun bila dilihat dari segi kebutuhannya terhadap jasa akuntansi, koperasi juga membutuhkan jasa akuntansi, baik untuk mengolah data keuangan guna menghasilkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan terhadap praktek pengelolaan usahanya.

Untuk memantau perkembangan kinerja koperasi tiap akhir tahun buku diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja manajemen koperasi selama satu periode tertentu. Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Rapat Anggota tentang segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Laporan tersebut merupakan hasil

akhir dari proses akuntansi yang disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang perkembangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan periodik.

Pada neraca koperasi terdiri dari aktiva, kewajiban dan modal. Untuk aktiva didalam neraca bentuk dan susunannya di awali dengan aktiva yang tahan lama kegunaannya atas wujud seperti tanah, gedung, mesin, peralatan dan lain-lain. Pada investasi jangka panjang terdapat penyertaan yang juga disajikan terpisah antara anggota dengan non anggota.

Sedangkan pada bagian kewajiban, bentuk dan penyajian kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan non anggota. Hal ini di anggap tepat karena informasi semacam ini merupakan petunjuk penting tentang manfaat yang dapat diberikan oleh koperasi kepada anggota.

Laporan perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban usaha selama periode tertentu. Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi.

Laporan arus kas menyajikan informasi arus kas suatu badan usaha yang berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setoran kas. Pada badan usaha koperasi penyajian laporan arus kas antara lain meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun

tertentu yang disesuaikan dengan jenis koperasi dan jenis usaha yang dijalankan. Manfaat tersebut mencakup dari pembelian barang atau pengadaan jasa koperasi, pemasaran dan pengelolaan bersama, simpan pinjam dan bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Catatan atas laporan keuangan koperasi merupakan bagian yang terpadu dari penyajian laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan koperasi.

Keberadaan Koperasi Wanita sendiri sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa Koperasi Wanita yang cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat secara kuantitas seperti peningkatan jumlah anggota, volume usaha dan peningkatan SHU sedangkan jika dilihat dari kualitas pengelolaan, Koperasi Wanita lebih konsisten dan memberikan dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Keberhasilan pengelolaan unit simpan pinjam tersebut tidak saja menguntungkan Kopwan yang bersangkutan, tetapi juga anggota Kopwan serta keluarga dan komunitas dimana Kopwan tersebut berdiri. Karenanya, secara lebih khusus peranan wanita dalam koperasi perlu didorong dengan beberapa alasan berkaitan dengan peranan wanita dalam peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya, dengan kata lain terdapat peranan yang besar wanita dalam pengentasan kemiskinan, kebutuhan wanita untuk memberdayakan diri (aktualisasi diri) agar dapat berperan lebih besar diluar posisinya sebagai ibu rumah tangga.

Konteks kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peranan wanita menjadi sangat penting. Dalam kaitan dengan hal tersebut, koperasi dapat menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, disamping kegiatan koperasi juga dapat dijadikan sebagai media aktualisasi diri wanita. Dari kajian yang dilakukan oleh DepKop memperlihatkan bahwa wanita dan koperasi memiliki kaitan yang penting karenanya perlu ditingkatkan peranannya secara terus menerus dengan beberapa alasan yaitu wanita merupakan aktor yang penting dalam kaitan dengan program pengentasan kemiskinan, wanita merupakan aktor penting dan terlibat langsung dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan wanita sebagai individu membutuhkan media dalam kaitan dengan aktualisasi diri agar dapat berperan lebih besar dari sekedar sebagai ibu rumah tangga.

Sampai dengan tahun buku 2015, Koperasi Wanita Cempaka Jaya masih mempergunakan sistem pembukuan biasa, belum mempergunakan sistem akuntansi dan perhitungan modern. Hal ini mengingat keterbatasan sarana prasarana, dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki yakni faktor usia karena rata-rata umur pengurusnya sudah 40 tahun keatas sehingga kurang mampu mengelola komputer.

Laporan keuangan yang dihasilkan Kopwan Cempaka Jaya sampai akhir tahun 2015 hanya berupa laporan neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan laporan keuangan yang lengkap menurut SAK ETAP harus ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan

keuangan. Dalam laporan sisa hasil usaha yang dihasilkan Kopwan Cempaka Jaya masih ada biaya-biaya yang belum dicatat, sedangkan dalam SAK ETAP menyatakan bahwa biaya pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan asset dan kewajiban.

Berdasarkan pengungkapan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul:

“ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA KOPERASI WANITA CEMPAKA JAYA DI KECAMATAN KRIAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu perumusan masalah yaitu bagaimana penerapan SAK ETAP pada Koperasi Wanita Cempaka Jaya di Kecamatan Krian?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan mengetahui kesesuaian penerapan penyajian laporan keuangan pada Koperasi Wanita Cempaka Jaya di Kecamatan Krian ditinjau berdasarkan SAK ETAP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Koperasi

Sebagai informasi tambahan dan bahan pertimbangan bagi Koperasi Wanita Cempaka Jaya di Kecamatan Krian dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan koperasi.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang SAK ETAP.

3. Bagi Peneliti

Sebagai pengaplikasian ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah dan menambah wawasan penulis dengan mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan ditinjau berdasarkan SAK ETAP.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi mengenai kondisi Koperasi Wanita Cempaka Jaya di Kecamatan Krian khususnya dalam penerapan laporan keuangannya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini dijelaskan berbagai landasan teori yang dipakai sebagai dasar dari penelitian yang dilakukan, tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menerangkan tentang langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta keabsahan temuan.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dari pembahasan data yang telah di kumpulkan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis dari hasil penelitian yang telah di kumpulkan.